

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi serta tuntutan reformasi yang semakin meningkat, peran akuntansi sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Kepentingan itu tidak hanya diperuntukkan untuk pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada banyak pihak yang memerlukan. Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. (Bahri, 2016).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 mewajibkan BUMDesa menyusun laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDesa setiap bulan dengan jujur dan transparan. Selain itu, BUMDesa juga wajib memberikan laporan perkembangan unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan BUMDesa dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur permodalan. Selain itu untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa dihindari. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 merupakan payung hukum BUMDesa terbaru yang ditetapkan pada tanggal 2 februari 2021 yang merupakan pedoman pelaksanaan pasal 117 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP Nomor 11

Tahun 2021 memberikan peluang yang luas bagi BUMDesa untuk berkembang melalui memproduksi barang/jasa, menampung, membeli dan memasarkan produk desa, menstimulus perekonomian desa, melayani kebutuhan dasar masyarakat desa, meningkatkan manfaat dan nilai ekonomi asset budaya dan sumber daya alam di desa. (Posmerdeka.com)

Bab 10 pasal 87 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa, BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) guna menuju desa yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dasar pembentukan BUMDesa sebagai lokomotif pembangunan didesa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable dari masyarakat desa. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDesa dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDesa mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa serta agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. (Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar dalam laporan keuangan. Standar penyusunan laporan keuangan tersebut berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dengan adanya standar ini dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) juga diharapkan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya. (IAI : 2009).

SAK ETAP merupakan salah satu standar keuangan yang ditetapkan untuk mempermudah UMKM dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM. Salah satu dampak dari penerapan SAK ETAP adalah terjadinya peningkatan dalam efisiensi, efektivitas dan produktivitas usaha. Selanjutnya perusahaan kecil dan menengah diharapkan dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana atau modal untuk pengembangan desanya (Seran, 2017).

Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah melahirkan ribuan Badan Usaha Milik Desa. Namun, dalam penetapan kebijakan, pelaksanaan dan pengelolaan BUMDesa masih banyak dijumpai masalah yang dihadapi BUMDesa antara lain terkait dengan aspek manajemen, standar akuntansi keuangan dan legalitas hukum. Badan Usaha Milik Desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk memanfaatkan segala potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Terkait dengan persoalan keuangan, Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) akan diterapkan dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Aturan atau teori yang menyatakan bahwa BUMDesa harus menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP tidak ada, yang terpenting BUMDesa sudah menyusun laporan keuangan. Tetapi karena BUMDesa merupakan suatu entitas maka layak jika menyusun laporan keuangan menggunakan SAK ETAP dan tidak menggunakan ISAK 35. Meskipun tidak ada keharusan, tetapi jika daripada BUMDesa tidak menyusun laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dana terhadap pemerintah, maka solusi penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK ETAP merupakan salah satu solusi yang layak untuk dilakukan meski ditemukan sebenarnya akan berguna jangka pendek. Untuk jangka panjang akan ada kegiatan penyeragaman BUMDesa dalam penyusunan laporan keuangan yang menggunakan aplikasi untuk penyeragaman sistem keuangan BUMDesa di setiap desa. Tetapi sebelum terjadi penyeragaman atau menggunakan aplikasi penyeragaman sistem keuangan, maka SAK ETAP ini masih layak sebagai sebuah solusi. SAK ETAP ini merupakan solusi atas ketidakmampuan BUMDesa yang semakin tahun semakin berkembang. (NusaBali.com).

Tujuan dari penyusunan SAK ETAP bukan hanya sebagai standar akuntansi keuangan yang layak bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan yang go public termasuk BUMDesa. Pembuatan laporan keuangan harus bersifat jujur dan transparan. BUMDesa juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. (Ferina, 2020).

Pengelolaan keuangan masih banyak BUMDesa yang sudah berkembang yang belum menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangannya karena dari beberapa masih memiliki anggapan bahwa informasi akuntansi tersebut tidak penting, tidak akan berdampak pada kondisi

keuangan mereka dan sulit diterapkan juga membuang waktu dan biaya. Hal terpenting bagi pengelola usaha adalah bagaimana cara menghasilkan laba yang banyak tanpa repot menerapkan akuntansi. Adanya keterbatasan pengetahuan pencatatan akuntansi, rumitnya proses akuntansi dan berbagai macam keterbatasan lain yang dihadapi oleh BUMDesa dalam menyusun laporan keuangan yakni kurang disiplin dan rajinnya dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi, tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan atau membeli software akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi, kurangnya sosialisasi tentang penerapan SAK ETAP yang membuat pelaku bisnis kecil menengah masih takut menggunakan SAK ETAP dan tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan bagi BUMDesa menyebabkan rendahnya praktek akuntansi pada BUMDesa di Indonesia (Sinarwati, 2014). Kenyataannya pengelolaan keuangan pada beberapa BUMDesa yang sudah berkembang terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan masih belum ada ketetapan yang mengharuskan mengacu kepada SAK ETAP. Padahal jika BUMDesa membuat laporan keuangan sesuai dengan pedoman SAK ETAP, laporan keuangan lebih fleksible dan dari beberapa aspek juga terlihat lebih ringan dan mudah dipergunakan. Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Hamzah et al., 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pencatatan (jurnal) atas berbagai transaksi yang dilakukan penggolongan transaksi pada BUMDes Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Langkitin menggunakan jurnal memorial untuk peringkasan neraca percobaan untuk pengikhtisaran sehingga belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Langkitin menyajikan laporan keuangan hanya dalam dua jenis yaitu neraca dan laporan laba rugi sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Harto & Riwandari, 2019 menyatakan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada *stakeholders* belum menunjukkan laporan keuangan yang komprehensif. Laporan yang dibuat hanya berupa laporan kas harian, menggambarkan kas masuk dan kas keluar. Hal ini tidak menggambarkan posisi keuangan akhir periode dan tidak memberikan informasi tentang keuntungan atau kerugian entitas pada periode tertentu. Ada banyaknya BUMDes di Kabupaten Buleleng belum terlaksanakan oleh beberapa desa dan dalam penerapan laporan keuangannya masih ada yang belum menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya karena memang tidak adanya ketentuan pasti dalam penerapan standar keuangan yang harus digunakan untuk suatu BUMDes.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali, Indonesia. Ibu Kotanya adalah Singaraja. Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan dengan 129 Desa, 19 Kelurahan, 551 Dusun/Banjar, dan 58 Lingkungan. Di Kabupaten Buleleng, perkembangan BUMDesa sudah terlihat semakin maju dan berkembang sejak dibentuknya. (Warta Ekonomi, 2018). Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng memiliki berbagai macam jenis usaha yang dikelolanya seperti jasa simpan pinjam, toko, tempat parkir, pengelolaan sampah, wisata bahari, pariwisata, air minum, ternak, pengelolaan pasar dan lain-lainnya. Jumlah BUMDesa di Kabupaten Buleleng sebanyak 117 BUMDesa yang tersebar di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng dengan asset total mencapai Rp 97,6 M (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 2019).

Kecamatan Sukasada merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Kecamatan Sukasada terdiri dari 15 desa yaitu Desa Wanagiri, Desa Ambengan, Desa Gitgit, Desa Panjianom, Desa Sambangan, Desa Pegayaman, Desa Pancasari, Desa Padang Bulia, Desa Panji, Desa Selat, Desa Kayuputih, Desa Silangjana, Desa Sukasada, Desa Tegallingah dan

Desa Pegadungan. Berdasarkan data Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kecamatan Sukasada terdapat empat BUMDes dan ada beberapa desa yang belum membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) karena kesulitan menemukan potensi yang akan dikelola dan kesulitan mencari sumber daya manusia (SDM) untuk organisasi BUMDesa. Empat Bumdes yang ada di Kecamatan Sukasada yaitu Desa Tegallinggah yang diberi nama Dwi Tunggal, Desa Wanagiri diberi nama Eka Giri Karya Utama, Desa Selat diberi nama Pandan Harum dan Desa Panji diberi nama Bhuana Utama. (Data BUMDesa Kabupaten Buleleng).

Badan Usaha Milik Desa yang didirikan di Desa Selat tersebut berdiri pada tanggal 10 Februari 2011 dengan nama Pandan Harum Desa Selat. Dengan didirikannya BUMDesa dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. BUMDesa Pandan Harum Desa Selat kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan asset desa untuk membangun kesejahteraan warga desa selat, karena bukan lagi program “*topdown*” atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga.

BUMDesa Pandan Harum pada awal berdiri yaitu tanggal 10 Februari 2011 bermodalkan nol rupiah atau tanpa modal. Walaupun demikian bukan berarti BUMDesa akan sulit berkembang, melainkan mampu berkembang dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya unit-unit usaha baru yang dikelola oleh BUMDesa Pandan Harum serta meningkatnya asset yang dimiliki. Semua itu tidak lepas dari penggalan potensi diawal berdiri dalam menentukan unit operasional didasarkan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam juga tak kalah penting adalah sumber daya Tuhan sebagai dasar pokok dalam

mengembangkan usaha. Kondisi ini dijadikan sebagai dasar pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh pengelola dalam pengelolaan BUMDesa Pandan Harum.

Peneliti melakukan penelitian di salah satu BUMDesa di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Sukasada yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pandan Harum Desa Selat. Alasan peneliti melakukan penelitian di BUMDesa Pandan Harum Desa Selat, dilihat dari keempat BUMDesa yang ada di Kecamatan Sukasada, BUMDesa Pandan Harum Desa Selat ini merupakan BUMDesa yang berdiri paling lama yaitu tahun 2011, memiliki potensi yang banyak yang dapat meningkatkan asset yang dimiliki, modal yang digunakan hanya bermodal nol rupiah atau tanpa modal yang mampu berkembang dengan pesat, memiliki empat unit usaha seperti : 1). Pengelolaan Hutan, 2). Gerbang Sadu, 3). KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) dan 4). Toko. BUMDesa Pandan Harum Desa Selat juga memiliki rencana lanjut seperti : 1). ATK, Toko dan Fotocopy, 2). Pembelian Hasil Bumi, 3). Hasil Hutan Non Kayu, 4). Pembuatan Bak Penampung Air, dan 5). Penambahan Jaringan Air.

Keunikan yang dimiliki BUMDes Pandan Harum Desa Selat ini : 1). Memiliki kawasan hutan seluas 535 Hektare yang berpotensi dapat dijadikan kebun raya karena memiliki potensi yang sangat menjanjikan dibidang pariwisata. Potensi yang dimiliki hutan desa selat dengan suhu udara yang mendukung bisa dijadikan kawasan pariwisata unggulan di Bali bagian Utara dan memiliki keunggulan yang menjadi pembeda seperti memiliki air terjun dan pemandangan laut yang sangat indah serta tanaman yang spesifik. 2). Memiliki unit usaha gerbang sadu yang mampu berupaya mendorong pembangunan desa yang berbasis pada sosial ekonomi masyarakat. Gerbang Sadu dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari dan berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa agar secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungan

secara mandiri. BUMDesa yang lama berdiri menjadi fokus untuk menentukan subyek penelitian. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Badan Usaha Milik Desa Pandan Harum Desa Selat terhadap pengembangan desa untuk mengetahui terkait masalah apakah BUMDesa tersebut dapat menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangannya. (Budiartini, 2019).

Berdasarkan hasil observasi sesuai dengan topik yang peneliti akan bahas dengan yang didapatkan dilapangan mengenai Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Pelaporan Keuangan pada BUMDesa Pandan Harum Desa Selat ini ditemukan permasalahan yaitu penerapan laporan keuangannya yang masih belum berdasarkan SAK ETAP. Apabila suatu lembaga atau organisasi telah menerapkan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan pada Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, lembaga tersebut dapat diindikasikan telah menyajikan laporan keuangan secara lengkap, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Badan Usaha Milik Desa Pandan Harum Desa Selat melakukan pencatatan keuangan hanya berdasarkan pemahamannya. Adapun Laporan Keuangan yang dibuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pandan Harum Desa Selat adalah : Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi.

BUMDesa Pandan Harum Desa Selat masih belum optimal dalam penyajian laporan keuangan yang disebabkan karena belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan yang dapat melihat perkembangan apakah mengalami keuntungan atau kerugian sehingga mampu menentukan sehat atau tidaknya dan masih memiliki anggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDesa sangat diperlukan, alasannya bahwa laporan keuangan yang menggunakan SAK ETAP mempunyai kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan dan membantu bisnis UKM untuk mendapatkan pinjaman dari bank sehingga bisnis lebih berkembang berkat suntikan

modal tersebut. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya untuk manajemen yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan dapat melihat posisi keuangan suatu organisasi pada BUMDesa.

Penggunaan SAK ETAP sangat diperlukan untuk menyusun laporan keuangan BUMDesa karena kelengkapan laporan keuangan yang lengkap sehingga bisa memberikan informasi yang akurat terhadap pengguna laporan keuangan, dibandingkan dengan SAK UMKM mempunyai banyak kendala yang dihadapi selain modal, sistem pembukuannya sangat sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang standar (baku). Hal ini menunjukkan bahwa SAK ETAP memberikan solusi untuk penyusunan laporan keuangan yang lengkap, serta sederhana dan mudah dipahami. Hanya mengatur transaksi yang dilakukan usaha kecil dan menengah. Serta alternatif yang digunakan dalam SAK ETAP sangat sederhana karena didalam penyusunan laporan keuangan SAK ETAP pengakuan dan penilaiannya dilakukan penyederhanaan. Penerapan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan menjadi salah satu hal mutlak yang harus dimiliki, jika BUMDesa Pandan Harum ingin terus mengembangkan usahanya. Maka penerapan SAK-ETAP dapat dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDesa Pandan Harum yang dapat mempermudah dalam penyajian laporan keuangan tersebut. (Sari, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas sangat diperlukan penelitian tentang Analisis Komparatif Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Badan Usaha Milik Desa Selat Kabupaten Buleleng. Berbeda dengan penelitian sebelumnya didalam penelitian ini akan membahas secara luas bukan hanya dari keberadaan BUMDesa saja tetapi akan melihat mengapa BUMDesa tidak menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan, bagaimana implementasi penerapan SAK ETAP pada BUMDesa Selat Kabupaten

Buleleng terhadap laporan keuangan, apa kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa Selat Kabupaten Buleleng, Jika Mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan berbeda dari segi waktu dan tempat. Untuk menggambarkan mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Desa serta pengelolaannya yang terarah dapat memberikan pedoman dan membantu pemerintah desa dalam pengelolaan untuk menghasilkan keuntungan untuk desa serta dalam hal ini BUMDesa harus memperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan dengan standar keuangan yang digunakan. Dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa seharusnya mengacu pada pedoman umum atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Hasil penelitian dari (Utara & Kepulauan, 2018) adalah laporan keuangan yang disajikan BUMDes Panggung Lestari terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan perubahan dalam laporan. BUMDes Panggung Lestari yang memiliki standar akuntansi umum tetapi belum menerapkan SAK ETAP. Sejauh ini Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari juga telah menjadi BUMDes independen sejak 2017. Hasil penelitian Maulinda Yuniar Sari. (2020) adalah laporan keuangan BUMDes belum sesuai dengan SAK ETAP, karena ada beberapa faktor yang belum terpenuhi. Diantaranya menggunakan akrual basis dan kas basis, belum dilakukan penyusutan atas asset tetap yang dimiliki, penyajian asset tetap dan asset lancar tidak dipisahkan dan tidak diurutkan, belum melakukan beban penyusutan, laporan keuangan hanya neraca dan laba/rugi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perlakuan akuntansi pada badan usaha serta menggambarkan bagaimana SAK ETAP diterapkan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Harum sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan menentukan suatu strategi perusahaan khususnya dalam mengoptimalkan fungsi dan peranan informasi.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Komparatif Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Badan Usaha Milik Desa Selat Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu pada pelaporan BUMDesa dikarenakan belum sepenuhnya sesuai dengan SAK-ETAP. Pada pembuatan laporan keuangan hanya membuat Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi, namun catatan yang dibuat perusahaan ini belum sepenuhnya sesuai dengan SAK-ETAP. Pengakuan dan pengukuran akun-akun laporan neraca dan laporan laba/rugi sebagian besar sudah sesuai dengan SAK-ETAP yang berlaku tersebut.

2.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar peneliti lebih terfokus, sehingga penelitian tidak menyimpang dan sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah di BUMDesa tersebut. Pada pelaporan keuangan masih belum sesuai dengan SAK-ETAP yang berlaku serta penelitian ini hanya pada penerapan SAK ETAP.

2.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu :

1. Mengapa Badan Usaha Milik Desa Tidak Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ?
2. Bagaimana Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Badan Usaha Milik Desa Selat Kabupaten Buleleng Terhadap Laporan Keuangan ?
3. Apa Kendala Yang Dihadapi Badan Usaha Milik Desa Selat Kabupaten Buleleng, Jika Mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Dalam Penyusunan Laporan Keuangan?

2.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Alasan Badan Usaha Milik Desa Tidak Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
2. Untuk Mengetahui Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Badan Usaha Milik Desa Selat Kabupaten Buleleng Terhadap Laporan Keuangan
3. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Badan Usaha Milik Desa Selat Kabupaten Buleleng, Jika Mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

2.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu :

2.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan wawasan, ilmu pengetahuan baru, informasi serta referensi selanjutnya yang berkaitan dengan Penerapan SAK ETAP pada BUMDesa.

2.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis dalam penerapan SAK ETAP pada BUMDesa sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat memperkenalkan dan memberikan wawasan mengenai finansial penerapan SAK ETAP BUMDesa dan dapat menjadi bahan referensi di perpustakaan untuk dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah atau dijadikan pedoman bagi peneliti selanjutnya.

c) Bagi BUMDesa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, masukan dan tambahan wawasan bagi bendahara BUMDesa dalam pembuatan laporan keuangan agar sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku.